

Judul : RUU Ketenagalistrikan: perluas peran swasta sediakan tenaga listrik
Tanggal : Minggu, 12 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Ketenagalistrikan Perluas Peran Swasta Sediakan Tenaga Listrik

FOTO: IC PRIBADI



Ateng Sutisna

ANGGOTA Komisi XII DPR Ateng Sutisna menyebut, pihaknya tengah mempercepat pembahasan RUU Ketenagalistrikan. Regulasi ini diharapkan membuat akses masyarakat terhadap listrik semakin merata, tanpa mengabaikan peluang pengembangan usaha kelistrikan.

Dia mengatakan, keadilan dalam sektor ketenagalistrikan berarti seluruh lapisan masyarakat Indonesia mampu mengakses dan menikmati pasokan daya yang andal secara merata. Selain itu, warga juga harus mampu membayar tarif listrik meskipun harga yang ditetapkan tidak selalu sama di setiap wilayah Tanah Air.

RUU Ketenagalistrikan, lanjutnya, akan membuka ruang lebar bagi tumbuhnya investasi swasta demi mendukung kemajuan sektor itu. Keterlibatan aktif para pelaku usaha akan menopang pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional tanpa mengurangi peran besar PLN jadi penyedia utama tenaga listrik bagi masyarakat luas.

Meskipun pengelolaan energi listrik secara umum tetap dipegang penuh PLN, berbagai usaha pendukung ketenagalistrikan lain harus terus didorong untuk berkembang. "Pembangkit swasta turut dipacu agar semakin bertumbuh melalui aturan baru yang sengaja membuka ruang investasi yang sangat luas,"

katanya, Kamis (9/7/2026).

Senada, anggota Komisi XII DPR Dewi Yustisiana berharap, RUU Ketenagalistrikan mampu memperluas akses bagi masyarakat, sekaligus menaikkan indikator utama kemajuan ekonomi. Revisi aturan itu bertujuan memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh pasokan daya yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Menurut Dewi, energi listrik harus bisa dinikmati semua warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara konsisten. "Pasokan daya itu wajib memenuhi standar keandalan yang tinggi, bertarif murah bagi masyarakat, serta selalu didistribusikan secara berkesinambungan tanpa ada hambatan," jelasnya.

Dia berharap, perubahan-perubahan pada pasal dalam regulasi baru bisa mendongkrak utilitas listrik per kapita per tahun. "Peningkatan pemakaian daya diharapkan terjadi seiring dengan pembenahan aturan hukum demi kepentingan seluruh masyarakat luas," ucapnya.

Data Kementerian ESDM menunjukkan realisasi konsumsi listrik nasional sepanjang 2025 mencapai 1.584 kWh per kapita, naik dari capaian 2024 sebesar 1.411 kWh per kapita. Meski terus meningkat, angka itu masih jauh di bawah konsumsi listrik per kapita Korea Selatan yang mendekati 12.000 kWh.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai, peningkatan konsumsi listrik merupakan salah satu parameter utama bagi negara yang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi serta industrialisasi. Tingginya daya serap energi mencerminkan gerak maju seluruh sektor industri dan ekonomi produktif di negara berkembang. ■ PYB